

## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2014  
TENTANG PENYESUIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 27 TAHUN 2014  
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2014**



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR 27 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2014**

**TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013**

**KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT**

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

**Menimbang :** bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara.

Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan cara sebagai berikut:

- a. gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- b. gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- c. gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
- d. gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

### Pasal 3

- (1) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar istansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
- (3) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila pimpinan instansi yang menerima pertambahan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima pertambahan; atau

b. apabila pimpinan instansi yang menerima pertuanan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

#### Pasal 4

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural di lingkungannya paling rendah eselon III.
- (2) Pendeklasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 5

Keputusan pendeklasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada pejabat yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan; dan
- b. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 6

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
- b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. selama menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2013; dan
  - b. setelah selesai menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.
- (3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 8

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
- b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013; atau

- b. bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.

#### Pasal 10

Penyesuaian gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan cara sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I/a dan golongan ruang I/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran II-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran II-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
- c. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran II-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 11

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan:

- a. Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan
- b. Salinan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2014

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1240

Sahkan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN I-a  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 27 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34  
 TAHUN 2014

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

GOLONGAN RUANG I/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG I/d

GOLONGAN RUANG I/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.323.000	1.402.400
2	1	1.323.000	1.402.400
3	2	1.364.700	1.446.500
4	3	1.364.700	1.446.500
5	4	1.407.600	1.492.100
6	5	1.407.600	1.492.100
7	6	1.452.000	1.539.100
8	7	1.452.000	1.539.100
9	8	1.497.700	1.587.600
10	9	1.497.700	1.587.600
11	10	1.544.900	1.637.600
12	11	1.544.900	1.637.600
13	12	1.593.500	1.689.200
14	13	1.593.500	1.689.200
15	14	1.643.700	1.742.400
16	15	1.643.700	1.742.400
17	16	1.695.500	1.797.200
18	17	1.695.500	1.797.200
19	18	1.748.900	1.853.800
20	19	1.748.900	1.853.800
21	20	1.804.000	1.912.200
22	21	1.804.000	1.912.200
23	22	1.860.800	1.972.400
24	23	1.860.800	1.972.400
25	24	1.919.400	2.034.600
26	25	1.919.400	2.034.600
27	26	1.979.900	2.098.600
28	27	1.979.900	2.098.600

## GOLONGAN RUANG I/b

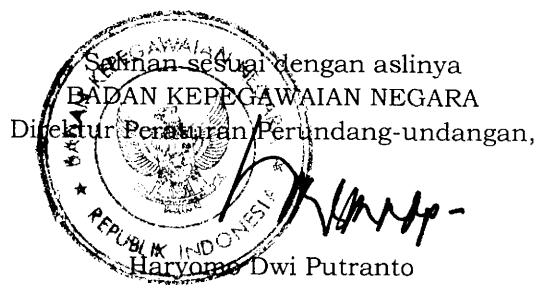
NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.444.800	1.531.500
5	4	1.444.800	1.531.500
6	5	1.490.300	1.579.700
7	6	1.490.300	1.579.700
8	7	1.537.200	1.629.500
9	8	1.537.200	1.629.500
10	9	1.585.600	1.680.800
11	10	1.585.600	1.680.800
12	11	1.635.600	1.733.700
13	12	1.635.600	1.733.700
14	13	1.687.100	1.788.300
15	14	1.687.100	1.788.300
16	15	1.740.200	1.844.700
17	16	1.740.200	1.844.700
18	17	1.795.000	1.902.700
19	18	1.795.000	1.902.700
20	19	1.851.600	1.962.700
21	20	1.851.600	1.962.700
22	21	1.909.900	2.024.500
23	22	1.909.900	2.024.500
24	23	1.970.000	2.088.300
25	24	1.970.000	2.088.300
26	25	2.032.100	2.154.000
27	26	2.032.100	2.154.000
28	27	2.096.100	2.221.900

## GOLONGAN RUANG I/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.505.900	1.596.300
5	4	1.505.900	1.596.300
6	5	1.553.300	1.646.500
7	6	1.553.300	1.646.500
8	7	1.602.300	1.698.400
9	8	1.602.300	1.698.400
10	9	1.652.700	1.751.900
11	10	1.652.700	1.751.900
12	11	1.704.800	1.807.100
13	12	1.704.800	1.807.100
14	13	1.758.500	1.864.000
15	14	1.758.500	1.864.000
16	15	1.813.800	1.922.700
17	16	1.813.800	1.922.700
18	17	1.871.000	1.983.200
19	18	1.871.000	1.983.200
20	19	1.929.900	2.045.700
21	20	1.929.900	2.045.700
22	21	1.990.700	2.110.100
23	22	1.990.700	2.110.100
24	23	2.053.400	2.176.600
25	24	2.053.400	2.176.600
26	25	2.118.100	2.245.100
27	26	2.118.100	2.245.100
28	27	2.184.800	2.315.800

## GOLONGAN RUANG I/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.569.600	1.663.800
5	4	1.569.600	1.663.800
6	5	1.619.000	1.716.200
7	6	1.619.000	1.716.200
8	7	1.670.000	1.770.200
9	8	1.670.000	1.770.200
10	9	1.722.600	1.826.000
11	10	1.722.600	1.826.000
12	11	1.776.900	1.883.500
13	12	1.776.900	1.883.500
14	13	1.832.800	1.942.800
15	14	1.832.800	1.942.800
16	15	1.890.600	2.004.000
17	16	1.890.600	2.004.000
18	17	1.950.100	2.067.100
19	18	1.950.100	2.067.100
20	19	2.011.500	2.132.200
21	20	2.011.500	2.132.200
22	21	2.074.900	2.199.400
23	22	2.074.900	2.199.400
24	23	2.140.200	2.268.700
25	24	2.140.200	2.268.700
26	25	2.207.600	2.340.100
27	26	2.207.600	2.340.100
28	27	2.277.200	2.413.800



KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

LAMPIRAN I-b  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 27 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34  
 TAHUN 2014

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/d

GOLONGAN RUANG II/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.714.100	1.816.900
2	1	1.741.100	1.845.600
3	2	1.741.100	1.845.600
4	3	1.795.900	1.903.700
5	4	1.795.900	1.903.700
6	5	1.852.500	1.963.600
7	6	1.852.500	1.963.600
8	7	1.910.800	2.025.500
9	8	1.910.800	2.025.500
10	9	1.971.000	2.089.300
11	10	1.971.000	2.089.300
12	11	2.033.100	2.155.100
13	12	2.033.100	2.155.100
14	13	2.097.100	2.223.000
15	14	2.097.100	2.223.000
16	15	2.163.200	2.293.000
17	16	2.163.200	2.293.000
18	17	2.231.300	2.365.200
19	18	2.231.300	2.365.200
20	19	2.301.600	2.439.700
21	20	2.301.600	2.439.700
22	21	2.374.100	2.516.500
23	22	2.374.100	2.516.500
24	23	2.448.800	2.595.800
25	24	2.448.800	2.595.800
26	25	2.526.000	2.677.500
27	26	2.526.000	2.677.500
28	27	2.605.500	2.761.900
29	28	2.605.500	2.761.900
30	29	2.687.600	2.848.800
31	30	2.687.600	2.848.800
32	31	2.772.200	2.938.600
33	32	2.772.200	2.938.600
34	33	2.859.500	3.031.100

## GOLONGAN RUANG II/b

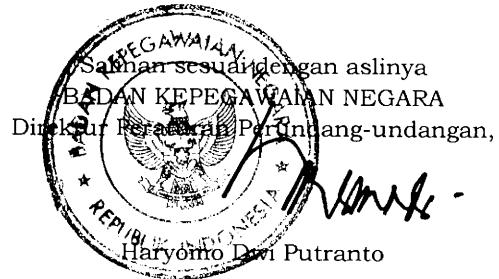
NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.871.900	1.984.200
5	4	1.871.900	1.984.200
6	5	1.930.900	2.046.700
7	6	1.930.900	2.046.700
8	7	1.991.700	2.111.200
9	8	1.991.700	2.111.200
10	9	2.054.400	2.177.700
11	10	2.054.400	2.177.700
12	11	2.119.100	2.246.200
13	12	2.119.100	2.246.200
14	13	2.185.800	2.317.000
15	14	2.185.800	2.317.000
16	15	2.254.700	2.390.000
17	16	2.254.700	2.390.000
18	17	2.325.700	2.465.200
19	18	2.325.700	2.465.200
20	19	2.398.900	2.542.900
21	20	2.398.900	2.542.900
22	21	2.474.500	2.623.000
23	22	2.474.500	2.623.000
24	23	2.552.400	2.705.600
25	24	2.552.400	2.705.600
26	25	2.632.800	2.790.800
27	26	2.632.800	2.790.800
28	27	2.715.700	2.878.700
29	28	2.715.700	2.878.700
30	29	2.801.300	2.969.300
31	30	2.801.300	2.969.300
32	31	2.889.500	3.062.900
33	32	2.889.500	3.062.900
34	33	2.980.500	3.159.300

## GOLONGAN RUANG II/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.951.100	2.068.100
5	4	1.951.100	2.068.100
6	5	2.012.500	2.133.300
7	6	2.012.500	2.133.300
8	7	2.075.900	2.200.500
9	8	2.075.900	2.200.500
10	9	2.141.300	2.269.800
11	10	2.141.300	2.269.800
12	11	2.208.700	2.341.300
13	12	2.208.700	2.341.300
14	13	2.278.300	2.415.000
15	14	2.278.300	2.415.000
16	15	2.350.100	2.491.100
17	16	2.350.100	2.491.100
18	17	2.424.100	2.569.500
19	18	2.424.100	2.569.500
20	19	2.500.400	2.650.400
21	20	2.500.400	2.650.400
22	21	2.579.200	2.733.900
23	22	2.579.200	2.733.900
24	23	2.660.400	2.820.000
25	24	2.660.400	2.820.000
26	25	2.744.200	2.908.800
27	26	2.744.200	2.908.800
28	27	2.830.600	3.000.400
29	28	2.830.600	3.000.400
30	29	2.919.800	3.094.900
31	30	2.919.800	3.094.900
32	31	3.011.700	3.192.400
33	32	3.011.700	3.192.400
34	33	3.106.600	3.293.000

## GOLONGAN RUANG II/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	2.033.600	2.155.600
5	4	2.033.600	2.155.600
6	5	2.097.700	2.223.500
7	6	2.097.700	2.223.500
8	7	2.163.700	2.293.500
9	8	2.163.700	2.293.500
10	9	2.231.900	2.365.800
11	10	2.231.900	2.365.800
12	11	2.302.200	2.440.300
13	12	2.302.200	2.440.300
14	13	2.374.700	2.517.200
15	14	2.374.700	2.517.200
16	15	2.449.500	2.596.400
17	16	2.449.500	2.596.400
18	17	2.526.600	2.678.200
19	18	2.526.600	2.678.200
20	19	2.606.200	2.762.600
21	20	2.606.200	2.762.600
22	21	2.688.300	2.849.600
23	22	2.688.300	2.849.600
24	23	2.772.900	2.939.300
25	24	2.772.900	2.939.300
26	25	2.860.300	3.031.900
27	26	2.860.300	3.031.900
28	27	2.950.300	3.127.400
29	28	2.950.300	3.127.400
30	29	3.043.300	3.225.900
31	30	3.043.300	3.225.900
32	31	3.139.100	3.327.500
33	32	3.139.100	3.327.500
34	33	3.238.000	3.432.300



KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

LAMPIRAN I-c  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 27 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34  
 TAHUN 2014

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/d

GOLONGAN RUANG III/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.186.400	2.317.600
2	1	2.186.400	2.317.600
3	2	2.255.200	2.390.600
4	3	2.255.200	2.390.600
5	4	2.326.300	2.465.900
6	5	2.326.300	2.465.900
7	6	2.399.500	2.543.500
8	7	2.399.500	2.543.500
9	8	2.475.100	2.623.600
10	9	2.475.100	2.623.600
11	10	2.553.100	2.706.300
12	11	2.553.100	2.706.300
13	12	2.633.500	2.791.500
14	13	2.633.500	2.791.500
15	14	2.716.400	2.879.400
16	15	2.716.400	2.879.400
17	16	2.802.000	2.970.100
18	17	2.802.000	2.970.100
19	18	2.890.200	3.063.600
20	19	2.890.200	3.063.600
21	20	2.981.300	3.160.100
22	21	2.981.300	3.160.100
23	22	3.075.100	3.259.700
24	23	3.075.100	3.259.700
25	24	3.172.000	3.362.300
26	25	3.172.000	3.362.300
27	26	3.271.900	3.468.200
28	27	3.271.900	3.468.200
29	28	3.374.900	3.577.400
30	29	3.374.900	3.577.400
31	30	3.481.200	3.690.100
32	31	3.481.200	3.690.100
33	32	3.590.900	3.806.300

## GOLONGAN RUANG III/b

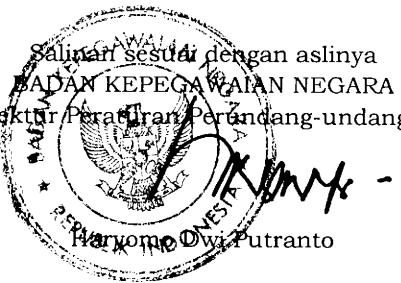
NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.278.900	2.415.600
2	1	2.278.900	2.415.600
3	2	2.350.600	2.491.700
4	3	2.350.600	2.491.700
5	4	2.424.700	2.570.200
6	5	2.424.700	2.570.200
7	6	2.501.000	2.651.100
8	7	2.501.000	2.651.100
9	8	2.579.800	2.734.600
10	9	2.579.800	2.734.600
11	10	2.661.100	2.820.700
12	11	2.661.100	2.820.700
13	12	2.744.900	2.909.600
14	13	2.744.900	2.909.600
15	14	2.831.300	3.001.200
16	15	2.831.300	3.001.200
17	16	2.920.500	3.095.700
18	17	2.920.500	3.095.700
19	18	3.012.500	3.193.200
20	19	3.012.500	3.193.200
21	20	3.107.400	3.293.800
22	21	3.107.400	3.293.800
23	22	3.205.200	3.397.500
24	23	3.205.200	3.397.500
25	24	3.306.200	3.504.500
26	25	3.306.200	3.504.500
27	26	3.410.300	3.614.900
28	27	3.410.300	3.614.900
29	28	3.517.700	3.728.800
30	29	3.517.700	3.728.800
31	30	3.628.500	3.846.200
32	31	3.628.500	3.846.200
33	32	3.742.800	3.967.300

## GOLONGAN RUANG III/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.375.300	2.517.800
2	1	2.375.300	2.517.800
3	2	2.450.100	2.597.100
4	3	2.450.100	2.597.100
5	4	2.527.200	2.678.900
6	5	2.527.200	2.678.900
7	6	2.606.800	2.763.300
8	7	2.606.800	2.763.300
9	8	2.688.900	2.850.300
10	9	2.688.900	2.850.300
11	10	2.773.600	2.940.000
12	11	2.773.600	2.940.000
13	12	2.861.000	3.032.600
14	13	2.861.000	3.032.600
15	14	2.951.100	3.128.200
16	15	2.951.100	3.128.200
17	16	3.044.000	3.226.700
18	17	3.044.000	3.226.700
19	18	3.139.900	3.328.300
20	19	3.139.900	3.328.300
21	20	3.238.800	3.433.100
22	21	3.238.800	3.433.100
23	22	3.340.800	3.541.300
24	23	3.340.800	3.541.300
25	24	3.446.000	3.652.800
26	25	3.446.000	3.652.800
27	26	3.554.600	3.767.800
28	27	3.554.600	3.767.800
29	28	3.666.500	3.886.500
30	29	3.666.500	3.886.500
31	30	3.782.000	4.008.900
32	31	3.782.000	4.008.900
33	32	3.901.100	4.135.200

## GOLONGAN RUANG III/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.475.700	2.624.300
2	1	2.475.700	2.624.300
3	2	2.553.700	2.706.900
4	3	2.553.700	2.706.900
5	4	2.634.100	2.792.200
6	5	2.634.100	2.792.200
7	6	2.717.100	2.880.100
8	7	2.717.100	2.880.100
9	8	2.802.700	2.970.800
10	9	2.802.700	2.970.800
11	10	2.891.000	3.064.400
12	11	2.891.000	3.064.400
13	12	2.982.000	3.160.900
14	13	2.982.000	3.160.900
15	14	3.075.900	3.260.500
16	15	3.075.900	3.260.500
17	16	3.172.800	3.363.200
18	17	3.172.800	3.363.200
19	18	3.272.700	3.469.100
20	19	3.272.700	3.469.100
21	20	3.375.800	3.578.400
22	21	3.375.800	3.578.400
23	22	3.482.100	3.691.100
24	23	3.482.100	3.691.100
25	24	3.591.800	3.807.300
26	25	3.591.800	3.807.300
27	26	3.704.900	3.927.200
28	27	3.704.900	3.927.200
29	28	3.821.600	4.050.900
30	29	3.821.600	4.050.900
31	30	3.942.000	4.178.500
32	31	3.942.000	4.178.500
33	32	4.066.100	4.310.100

Salinan sesuai dengan aslinya  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,  
 EKO SUTRISNO  
  
 Harryono Dwi Putranto

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

LAMPIRAN I-d  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 27 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34  
 TAHUN 2014

**DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014**

GOLONGAN RUANG IV/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG IV/e

**GOLONGAN RUANG IV/a**

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.580.500	2.735.300
2	1	2.580.500	2.735.300
3	2	2.661.700	2.821.400
4	3	2.661.700	2.821.400
5	4	2.745.600	2.910.300
6	5	2.745.600	2.910.300
7	6	2.832.000	3.002.000
8	7	2.832.000	3.002.000
9	8	2.921.200	3.096.500
10	9	2.921.200	3.096.500
11	10	3.013.200	3.194.000
12	11	3.013.200	3.194.000
13	12	3.108.100	3.294.600
14	13	3.108.100	3.294.600
15	14	3.206.000	3.398.400
16	15	3.206.000	3.398.400
17	16	3.307.000	3.505.400
18	17	3.307.000	3.505.400
19	18	3.411.200	3.615.800
20	19	3.411.200	3.615.800
21	20	3.518.600	3.729.700
22	21	3.518.600	3.729.700
23	22	3.629.400	3.847.200
24	23	3.629.400	3.847.200
25	24	3.743.700	3.968.300
26	25	3.743.700	3.968.300
27	26	3.861.600	4.093.300
28	27	3.861.600	4.093.300
29	28	3.983.300	4.222.300
30	29	3.983.300	4.222.300
31	30	4.108.700	4.355.200
32	31	4.108.700	4.355.200
33	32	4.238.100	4.492.400

## GOLONGAN RUANG IV/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.689.600	2.851.000
2	1	2.689.600	2.851.000
3	2	2.774.300	2.940.800
4	3	2.774.300	2.940.800
5	4	2.861.700	3.033.400
6	5	2.861.700	3.033.400
7	6	2.951.800	3.128.900
8	7	2.951.800	3.128.900
9	8	3.044.800	3.227.500
10	9	3.044.800	3.227.500
11	10	3.140.700	3.329.100
12	11	3.140.700	3.329.100
13	12	3.239.600	3.434.000
14	13	3.239.600	3.434.000
15	14	3.341.700	3.542.200
16	15	3.341.700	3.542.200
17	16	3.446.900	3.653.700
18	17	3.446.900	3.653.700
19	18	3.555.500	3.768.800
20	19	3.555.500	3.768.800
21	20	3.667.400	3.887.500
22	21	3.667.400	3.887.500
23	22	3.782.900	4.009.900
24	23	3.782.900	4.009.900
25	24	3.902.100	4.136.200
26	25	3.902.100	4.136.200
27	26	4.025.000	4.266.500
28	27	4.025.000	4.266.500
29	28	4.151.700	4.400.900
30	29	4.151.700	4.400.900
31	30	4.282.500	4.539.500
32	31	4.282.500	4.539.500
33	32	4.417.400	4.682.400

## GOLONGAN RUANG IV/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.803.400	2.971.600
2	1	2.803.400	2.971.600
3	2	2.891.700	3.065.200
4	3	2.891.700	3.065.200
5	4	2.982.800	3.161.700
6	5	2.982.800	3.161.700
7	6	3.076.700	3.261.300
8	7	3.076.700	3.261.300
9	8	3.173.600	3.364.000
10	9	3.173.600	3.364.000
11	10	3.273.600	3.470.000
12	11	3.273.600	3.470.000
13	12	3.376.700	3.579.300
14	13	3.376.700	3.579.300
15	14	3.483.000	3.692.000
16	15	3.483.000	3.692.000
17	16	3.592.700	3.808.300
18	17	3.592.700	3.808.300
19	18	3.705.900	3.928.200
20	19	3.705.900	3.928.200
21	20	3.822.600	4.051.900
22	21	3.822.600	4.051.900
23	22	3.943.000	4.179.500
24	23	3.943.000	4.179.500
25	24	4.067.100	4.311.200
26	25	4.067.100	4.311.200
27	26	4.195.200	4.447.000
28	27	4.195.200	4.447.000
29	28	4.327.400	4.587.000
30	29	4.327.400	4.587.000
31	30	4.463.700	4.731.500
32	31	4.463.700	4.731.500
33	32	4.604.200	4.880.500

## GOLONGAN RUANG IV/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.922.000	3.097.300
2	1	2.922.000	3.097.300
3	2	3.014.000	3.194.800
4	3	3.014.000	3.194.800
5	4	3.108.900	3.295.500
6	5	3.108.900	3.295.500
7	6	3.206.800	3.399.300
8	7	3.206.800	3.399.300
9	8	3.307.800	3.506.300
10	9	3.307.800	3.506.300
11	10	3.412.000	3.616.700
12	11	3.412.000	3.616.700
13	12	3.519.500	3.730.700
14	13	3.519.500	3.730.700
15	14	3.630.300	3.848.200
16	15	3.630.300	3.848.200
17	16	3.744.700	3.969.400
18	17	3.744.700	3.969.400
19	18	3.862.600	4.094.400
20	19	3.862.600	4.094.400
21	20	3.984.300	4.223.300
22	21	3.984.300	4.223.300
23	22	4.109.700	4.356.300
24	23	4.109.700	4.356.300
25	24	4.239.200	4.493.500
26	25	4.239.200	4.493.500
27	26	4.372.700	4.635.100
28	27	4.372.700	4.635.100
29	28	4.510.400	4.781.000
30	29	4.510.400	4.781.000
31	30	4.652.500	4.931.600
32	31	4.652.500	4.931.600
33	32	4.799.000	5.086.900

## GOLONGAN RUANG IV/e

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	3.045.600	3.228.300
2	1	3.045.600	3.228.300
3	2	3.141.500	3.330.000
4	3	3.141.500	3.330.000
5	4	3.240.400	3.434.900
6	5	3.240.400	3.434.900
7	6	3.342.500	3.543.000
8	7	3.342.500	3.543.000
9	8	3.447.800	3.654.600
10	9	3.447.800	3.654.600
11	10	3.556.400	3.769.700
12	11	3.556.400	3.769.700
13	12	3.668.400	3.888.500
14	13	3.668.400	3.888.500
15	14	3.783.900	4.010.900
16	15	3.783.900	4.010.900
17	16	3.903.100	4.137.300
18	17	3.903.100	4.137.300
19	18	4.026.000	4.267.600
20	19	4.026.000	4.267.600
21	20	4.152.800	4.402.000
22	21	4.152.800	4.402.000
23	22	4.283.600	4.540.600
24	23	4.283.600	4.540.600
25	24	4.418.500	4.683.600
26	25	4.418.500	4.683.600
27	26	4.557.700	4.831.100
28	27	4.557.700	4.831.100
29	28	4.701.200	4.983.300
30	29	4.701.200	4.983.300
31	30	4.849.300	5.140.200
32	31	4.849.300	5.140.200
33	32	5.002.000	5.302.100

Salinan sesuai dengan aslinya  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Diketahui Peraturan Perundang-undangan,  
 Haryomo Dwi Putranto



- EKO SUTRISNO

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

LAMPIRAN I-e  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI  
POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI  
POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

CONTOH:

KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS

KEPUTUSAN ..... 1)  
NOMOR ..... 2)  
TENTANG  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
....., 1)

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, perlu menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);  
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014);  
6. Keputusan ... Nomor ... tanggal ..... 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil 4) sebagai berikut:

1	Nama	5)
2	NIP	6)
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir	7)
4	Pangkat, golongan ruang	8)
5	Masa kerja golongan	Tahun      bulan 9)
6	Gaji pokok lama	Rp. 10)
7	Gaji pokok baru	Rp. 11)
8	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	Tahun      bulan 12)
9	Jabatan	13)
10	Unit kerja	14)
11	Keterangan	15)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 16)  
pada tanggal ..... 17)

....., 1)

..... 18)  
NIP. ..... 19)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan ..... 20) di ..... 21);
2. Pembuat Daftar Gaji ..... 22); dan
3. ..... 23)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-e

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
2	2)	Tulislah nomor keputusan penyesuaian gaji pokok.
3	3)	Tulislah jika ada keputusan pendeklasian wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
4	4)	Coret salah satu, PNS atau CPNS sesuai status kepegawaian yang bersangkutan.
5	5)	Tulislah nama yang bersangkutan.
6	6)	Tulislah NIP yang bersangkutan.
7	7)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang bersangkutan sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS.
8	8)	Tulislah pangkat, golongan ruang terakhir yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang bersangkutan, pada tanggal 31 Desember 2013.
10	10)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok lama yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok baru yang bersangkutan.
12	12)	Tulislah dengan angka tahun, bulan dengan cara menghitung selisih antara masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan masa kerja yang dimiliki yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2013.
13	13)	Tulislah nama jabatan yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah unit kerja yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah hal-hal yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan keputusan penyesuaian gaji pokok. Misal, yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan negara, dan sebagainya.
16	16)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
17	17)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
18	18)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
19	19)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
20	20)	Tulislah nama instansi yang bersangkutan.
21	21)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan.
22	22)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
23	23)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Sertai dengan aslinya  
BAGIAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktorat Peraturan Perundang-undangan,

ttd.

EKO SUTRISNO

Haryomo Dwi Putranto



LAMPIRAN I-f  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI  
POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 34 TAHUN 2014

CONTOH :

KEPUTUSAN PENDELEGASIAN WEWENANG  
UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS

KEPUTUSAN..... 1)

NOMOR ..... 2)

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., 1)

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, perlu memberikan delegasi wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;  
b. .... 3);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);  
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013

Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);

5. .... 4);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada ..... NIP ..... jabatan .....  
5) untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ..... 6).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 7)  
pada tanggal ..... 8)

....., 1)

..... 9)  
NIP. ..... 10)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan ..... 11) di .....12); dan
2. .....13).

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-f

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan pendeklegasian wewenang.
2	2)	Tulislah nomor keputusan pendeklegasian wewenang.
3	3)	Tulislah konsideran lain yang dianggap perlu.
4	4)	Tulislah dasar hukum peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu.
5	5)	Tulislah nama, NIP, dan jabatan yang diberi delegasi wewenang.
6	6)	Tulislah instansi PNS yang disesuaikan gaji pokok.
7	7)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan pendeklegasian wewenang.
8	8)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan pendeklegasian wewenang.
9	9)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan pendeklegasian wewenang.
10	10)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan pendeklegasian wewenang.
11	11)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Salingan dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktorat Peraturan Perundang-undangan,  


ttd.  
EKO SUTRISNO

Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN I-g  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI  
POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 34 TAHUN 2014

CONTOH:

KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS  
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERUPA  
PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

KEPUTUSAN ..... 1)

NOMOR ..... 2)

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN  
BERUPA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., 1)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal .....3), Sdr. .....4) NIP. .....5), terhitung mulai tanggal ..... s/d tanggal ..... 6) telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);  
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
6. Keputusan ... Nomor ... tanggal ...7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1	Nama	4)
2	NIP	5)
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir	8)
4	Pangkat, golongan ruang	9)
5	Masa kerja golongan	Tahun      bulan 10)
6	Gaji pokok lama	Rp. 11)
7	Gaji pokok baru	Rp. 12)
8	Jabatan	13)
9	Unit kerja	14)

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., 15) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi sebagai berikut:

1	Pangkat, golongan ruang	16)
2	Masa kerja golongan	Tahun      bulan 17)
3	Gaji pokok lama	Rp. 18)
4	Gaji pokok baru	Rp. 19)
5	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	Tahun      bulan 20)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 21)  
pada tanggal ..... 22)

.....,  
1)

..... (23)  
NIP. ..... (24)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan ..... 25) di ..... 26);
2. Pembuat Daftar Gaji ..... 27); dan
3. ..... 28)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-g

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
2	2)	Tulislah nomor keputusan penyesuaian gaji pokok.
3	3)	Tulislah nama jabatan, nomor dan tanggal keputusan hukuman disiplin.
4	4)	Tulislah nama PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
5	5)	Tulislah NIP PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
6	6)	Tulislah tanggal mulai berlaku dan berakhirnya hukuman disiplin.
7	7)	Tulislah jika ada keputusan pendeklegasian wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
8	8)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang bersangkutan sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS.
9	9)	Tulislah pangkat, golongan ruang pada tanggal 31 Desember 2013.
10	10)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2013.
11	11)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok lama sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2013.
12	12)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok baru sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2013.
13	13)	Tulislah nama jabatan yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun dikembalikannya gaji pokok yang bersangkutan setelah berakhirnya hukuman disiplin.
16	16)	Tulislah pangkat, golongan ruang yang bersangkutan setelah dikembalikan pada pangkat semula, setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
17	17)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang baru yang bersangkutan, setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
18	18)	Tulislah dengan angka, besarnya gaji pokok lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan setelah selesai menjalani hukuman disiplin.

19	19)	Tulislah dengan angka, besarnya gaji pokok baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun 2014 sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
20	20)	Tulislah dengan angka tahun, bulan dengan cara menghitung selisih antara selisih masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan jumlah masa kerja yang dimiliki PNS yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2013.
21	21)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
22	22)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
23	23)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
24	24)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
25	25)	Tulislah nama instansi yang bersangkutan.
26	26)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan.
27	27)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
28	28)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,  
  
Haryomo Dwi Putranto

ttd.  
EKO SUTRISNO

LAMPIRAN II-a  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 27 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34  
 TAHUN 2014

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

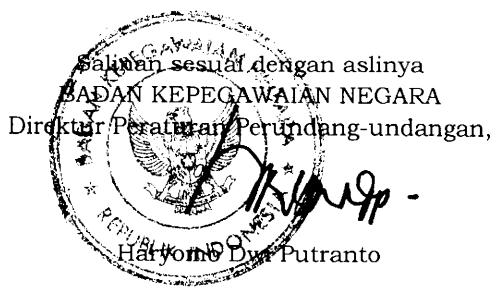
GOLONGAN RUANG I/a DAN GOLONGAN RUANG I/c

GOLONGAN RUANG I/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.058.400	1.121.920
2	1	1.058.400	1.121.920
3	2	1.091.760	1.157.200
4	3	1.091.760	1.157.200
5	4	1.126.080	1.193.680
6	5	1.126.080	1.193.680
7	6	1.161.600	1.231.280
8	7	1.161.600	1.231.280
9	8	1.198.160	1.270.080
10	9	1.198.160	1.270.080
11	10	1.235.920	1.310.080
12	11	1.235.920	1.310.080
13	12	1.274.800	1.351.360
14	13	1.274.800	1.351.360
15	14	1.314.960	1.393.920
16	15	1.314.960	1.393.920
17	16	1.356.400	1.437.760
18	17	1.356.400	1.437.760
19	18	1.399.120	1.483.040
20	19	1.399.120	1.483.040
21	20	1.443.200	1.529.760
22	21	1.443.200	1.529.760
23	22	1.488.640	1.577.920
24	23	1.488.640	1.577.920
25	24	1.535.520	1.627.680
26	25	1.535.520	1.627.680
27	26	1.583.920	1.678.880
28	27	1.583.920	1.678.880

## GOLONGAN RUANG I/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.204.720	1.277.040
5	4	1.204.720	1.277.040
6	5	1.242.640	1.317.200
7	6	1.242.640	1.317.200
8	7	1.281.840	1.358.720
9	8	1.281.840	1.358.720
10	9	1.322.160	1.401.520
11	10	1.322.160	1.401.520
12	11	1.363.840	1.445.680
13	12	1.363.840	1.445.680
14	13	1.406.800	1.491.200
15	14	1.406.800	1.491.200
16	15	1.451.040	1.538.160
17	16	1.451.040	1.538.160
18	17	1.496.800	1.586.560
19	18	1.496.800	1.586.560
20	19	1.543.920	1.636.560
21	20	1.543.920	1.636.560
22	21	1.592.560	1.688.080
23	22	1.592.560	1.688.080
24	23	1.642.720	1.741.280
25	24	1.642.720	1.741.280
26	25	1.694.480	1.796.080
27	26	1.694.480	1.796.080
28	27	1.747.840	1.852.640



KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

LAMPIRAN II-b  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 27 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34  
 TAHUN 2014

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/c  
 GOLONGAN RUANG II/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.371.280	1.453.520
2	1	1.392.880	1.476.480
3	2	1.392.880	1.476.480
4	3	1.436.720	1.522.960
5	4	1.436.720	1.522.960
6	5	1.482.000	1.570.880
7	6	1.482.000	1.570.880
8	7	1.528.640	1.620.400
9	8	1.528.640	1.620.400
10	9	1.576.800	1.671.440
11	10	1.576.800	1.671.440
12	11	1.626.480	1.724.080
13	12	1.626.480	1.724.080
14	13	1.677.680	1.778.400
15	14	1.677.680	1.778.400
16	15	1.730.560	1.834.400
17	16	1.730.560	1.834.400
18	17	1.785.040	1.892.160
19	18	1.785.040	1.892.160
20	19	1.841.280	1.951.760
21	20	1.841.280	1.951.760
22	21	1.899.280	2.013.200
23	22	1.899.280	2.013.200
24	23	1.959.040	2.076.640
25	24	1.959.040	2.076.640
26	25	2.020.800	2.142.000
27	26	2.020.800	2.142.000
28	27	2.084.400	2.209.520
29	28	2.084.400	2.209.520
30	29	2.150.080	2.279.040
31	30	2.150.080	2.279.040
32	31	2.217.760	2.350.880
33	32	2.217.760	2.350.880
34	33	2.287.600	2.424.880

## GOLONGAN RUANG II/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.497.520	1.587.360
5	4	1.497.520	1.587.360
6	5	1.544.720	1.637.360
7	6	1.544.720	1.637.360
8	7	1.593.360	1.688.960
9	8	1.593.360	1.688.960
10	9	1.643.520	1.742.160
11	10	1.643.520	1.742.160
12	11	1.695.280	1.796.960
13	12	1.695.280	1.796.960
14	13	1.748.640	1.853.600
15	14	1.748.640	1.853.600
16	15	1.803.760	1.912.000
17	16	1.803.760	1.912.000
18	17	1.860.560	1.972.160
19	18	1.860.560	1.972.160
20	19	1.919.120	2.034.320
21	20	1.919.120	2.034.320
22	21	1.979.600	2.098.400
23	22	1.979.600	2.098.400
24	23	2.041.920	2.164.480
25	24	2.041.920	2.164.480
26	25	2.106.240	2.232.640
27	26	2.106.240	2.232.640
28	27	2.172.560	2.302.960
29	28	2.172.560	2.302.960
30	29	2.241.040	2.375.440
31	30	2.241.040	2.375.440
32	31	2.311.600	2.450.320
33	32	2.311.600	2.450.320
34	33	2.384.400	2.527.440

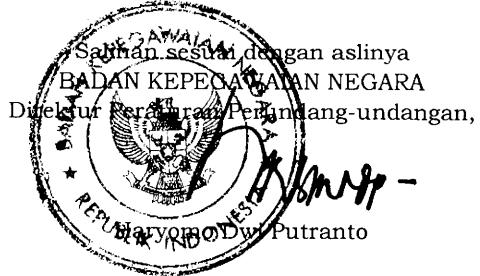
## GOLONGAN RUANG II/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.560.880	1.654.480
5	4	1.560.880	1.654.480
6	5	1.610.000	1.706.640
7	6	1.610.000	1.706.640
8	7	1.660.720	1.760.400
9	8	1.660.720	1.760.400
10	9	1.713.040	1.815.840
11	10	1.713.040	1.815.840
12	11	1.766.960	1.873.040
13	12	1.766.960	1.873.040
14	13	1.822.640	1.932.000
15	14	1.822.640	1.932.000
16	15	1.880.080	1.992.880
17	16	1.880.080	1.992.880
18	17	1.939.280	2.055.600
19	18	1.939.280	2.055.600
20	19	2.000.320	2.120.320
21	20	2.000.320	2.120.320
22	21	2.063.360	2.187.120
23	22	2.063.360	2.187.120
24	23	2.128.320	2.256.000
25	24	2.128.320	2.256.000
26	25	2.195.360	2.327.040
27	26	2.195.360	2.327.040
28	27	2.264.480	2.400.320
29	28	2.264.480	2.400.320
30	29	2.335.840	2.475.920
31	30	2.335.840	2.475.920
32	31	2.409.360	2.553.920
33	32	2.409.360	2.553.920
34	33	2.485.280	2.634.400

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO



LAMPIRAN II-c  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 27 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 73TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34  
 TAHUN 2014

**DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014**

GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/c

**GOLONGAN RUANG III/a**

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.749.120	1.854.080
2	1	1.749.120	1.854.080
3	2	1.804.160	1.912.480
4	3	1.804.160	1.912.480
5	4	1.861.040	1.972.720
6	5	1.861.040	1.972.720
7	6	1.919.600	2.034.800
8	7	1.919.600	2.034.800
9	8	1.980.080	2.098.880
10	9	1.980.080	2.098.880
11	10	2.042.480	2.165.040
12	11	2.042.480	2.165.040
13	12	2.106.800	2.233.200
14	13	2.106.800	2.233.200
15	14	2.173.120	2.303.520
16	15	2.173.120	2.303.520
17	16	2.241.600	2.376.080
18	17	2.241.600	2.376.080
19	18	2.312.160	2.450.880
20	19	2.312.160	2.450.880
21	20	2.385.040	2.528.080
22	21	2.385.040	2.528.080
23	22	2.460.080	2.607.760
24	23	2.460.080	2.607.760
25	24	2.537.600	2.689.840
26	25	2.537.600	2.689.840
27	26	2.617.520	2.774.560
28	27	2.617.520	2.774.560
29	28	2.699.920	2.861.920
30	29	2.699.920	2.861.920
31	30	2.784.960	2.952.080
32	31	2.784.960	2.952.080
33	32	2.872.720	3.045.040

## GOLONGAN RUANG III/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.823.120	1.932.480
2	1	1.823.120	1.932.480
3	2	1.880.480	1.993.360
4	3	1.880.480	1.993.360
5	4	1.939.760	2.056.160
6	5	1.939.760	2.056.160
7	6	2.000.800	2.120.880
8	7	2.000.800	2.120.880
9	8	2.063.840	2.187.680
10	9	2.063.840	2.187.680
11	10	2.128.880	2.256.560
12	11	2.128.880	2.256.560
13	12	2.195.920	2.327.680
14	13	2.195.920	2.327.680
15	14	2.265.040	2.400.960
16	15	2.265.040	2.400.960
17	16	2.336.400	2.476.560
18	17	2.336.400	2.476.560
19	18	2.410.000	2.554.560
20	19	2.410.000	2.554.560
21	20	2.485.920	2.635.040
22	21	2.485.920	2.635.040
23	22	2.564.160	2.718.000
24	23	2.564.160	2.718.000
25	24	2.644.960	2.803.600
26	25	2.644.960	2.803.600
27	26	2.728.240	2.891.920
28	27	2.728.240	2.891.920
29	28	2.814.160	2.983.040
30	29	2.814.160	2.983.040
31	30	2.902.800	3.076.960
32	31	2.902.800	3.076.960
33	32	2.994.240	3.173.840

## GOLONGAN RUANG III/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)	PP NO 34 TAHUN 2014 (Rp)
1	2	4	6
1	0	1.900.240	2.014.240
2	1	1.900.240	2.014.240
3	2	1.960.080	2.077.680
4	3	1.960.080	2.077.680
5	4	2.021.760	2.143.120
6	5	2.021.760	2.143.120
7	6	2.085.440	2.210.640
8	7	2.085.440	2.210.640
9	8	2.151.120	2.280.240
10	9	2.151.120	2.280.240
11	10	2.218.880	2.352.000
12	11	2.218.880	2.352.000
13	12	2.288.800	2.426.080
14	13	2.288.800	2.426.080
15	14	2.360.880	2.502.560
16	15	2.360.880	2.502.560
17	16	2.435.200	2.581.360
18	17	2.435.200	2.581.360
19	18	2.511.920	2.662.640
20	19	2.511.920	2.662.640
21	20	2.591.040	2.746.480
22	21	2.591.040	2.746.480
23	22	2.672.640	2.833.040
24	23	2.672.640	2.833.040
25	24	2.756.800	2.922.240
26	25	2.756.800	2.922.240
27	26	2.843.680	3.014.240
28	27	2.843.680	3.014.240
29	28	2.933.200	3.109.200
30	29	2.933.200	3.109.200
31	30	3.025.600	3.207.120
32	31	3.025.600	3.207.120
33	32	3.120.880	3.308.160



KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22  
TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI  
SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34  
TAHUN 2014



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;  
b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
  - e. Nomor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
  - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
  - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
  - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
  - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
  - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
  - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
  - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
  - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); dan
  - o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57),  
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Widmu Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2014

NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.402.400																			
1	1.446.500																			
2	1.492.100	1.531.500	1.596.300	1.663.800																
3	1.539.100	1.579.700	1.646.500	1.716.200	0	1.816.900														
4	1.587.600	1.629.500	1.698.400	1.770.200	1	1.845.600														
5	1.637.600	1.733.700	1.807.100	1.883.500	2	1.903.700	1.984.200	2.068.100	2.155.600	3	2.317.600	2.415.600	2.517.800	2.624.300	0	2.735.300	2.851.000	2.971.600	3.097.300	3.228.300
6	1.689.200	1.788.300	1.864.000	1.942.800	4	1.963.600	2.046.700	2.133.300	2.223.500	5	2.390.600	2.491.700	2.597.100	2.706.900	1	2.821.400	2.940.800	3.065.200	3.194.800	3.330.000
7	1.742.400	1.844.700	1.922.700	2.004.000	6	2.025.500	2.111.200	2.200.500	2.293.500	7	2.465.900	2.570.200	2.678.900	2.792.200	2	2.910.300	3.033.400	3.161.700	3.295.500	3.434.900
8	1.797.200	1.902.700	1.983.200	2.067.100	8	2.089.300	2.177.700	2.269.800	2.365.800	9	2.543.500	2.651.100	2.763.300	2.880.100	3	3.002.000	3.128.900	3.261.300	3.399.300	3.543.000
9	1.853.800	1.962.700	2.045.700	2.132.200	10	2.155.100	2.246.200	2.341.300	2.440.300	11	2.623.600	2.734.600	2.850.300	2.970.800	4	3.096.500	3.227.500	3.364.000	3.506.300	3.654.600
10	1.912.200	2.024.500	2.110.100	2.199.400	12	2.293.000	2.390.000	2.491.100	2.596.400	13	2.706.300	2.820.700	2.940.000	3.064.400	5	3.194.000	3.329.100	3.470.000	3.616.700	3.769.700
11	1.972.400	2.088.300	2.176.600	2.268.700	14	2.365.200	2.465.200	2.569.500	2.678.200	15	2.791.500	2.909.600	3.032.600	3.160.900	6	3.294.600	3.434.000	3.579.300	3.730.700	3.888.500
12	2.034.600	2.154.000	2.245.100	2.340.100	16	2.439.700	2.542.900	2.650.400	2.762.600	17	2.879.400	3.001.200	3.128.200	3.260.500	7	3.398.400	3.542.200	3.692.000	3.848.200	4.010.900
13	2.098.600	2.221.900	2.315.800	2.413.800	18	2.516.500	2.623.000	2.733.900	2.849.600	19	2.970.100	3.095.700	3.226.700	3.363.200	8	3.505.400	3.653.700	3.808.300	3.969.400	4.137.300
14					20	2.595.800	2.705.600	2.820.000	2.939.300	21	3.259.700	3.397.500	3.541.300	3.691.100	9	3.847.200	4.009.900	4.179.500	4.356.300	4.540.600
15					22	2.677.500	2.790.800	2.908.800	3.031.900	23	3.362.300	3.504.500	3.652.800	3.807.300	10	3.968.300	4.136.200	4.311.200	4.493.500	4.683.600
16					24	2.761.900	2.878.700	3.000.400	3.127.400	25	3.468.200	3.614.900	3.767.800	3.927.200	11	4.093.300	4.266.500	4.447.000	4.635.100	4.831.100
17					26	2.848.800	2.969.300	3.094.900	3.225.900	27	3.577.400	3.728.800	3.886.500	4.050.900	12	4.222.300	4.400.900	4.587.000	4.781.000	4.983.300
18					28	3.031.100	3.159.300	3.293.000	3.432.300	29	3.690.100	3.846.200	4.008.900	4.178.500	13	4.355.200	4.539.500	4.731.500	4.931.600	5.140.200
19					30					30					31					
20					31					31					32					
21					32					32					33					

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
~~Diketahui oleh~~ dan Kesejahteraan Rakyat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22  
TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI  
SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34  
TAHUN 2014



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.

(2) Pegawai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Surat Indrijarso



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 73 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 JULI 2014

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.323.000	1.402.400						
1								
2	1.364.700	1.446.500						
3			1.444.800	1.531.500	1.505.900	1.596.300	1.569.600	1.663.800
4	1.407.600	1.492.100						
5			1.490.300	1.579.700	1.553.300	1.646.500	1.619.000	1.716.200
6	1.452.000	1.539.100						
7			1.537.200	1.629.500	1.602.300	1.698.400	1.670.000	1.770.200
8	1.497.700	1.587.600						
9			1.585.600	1.680.800	1.652.700	1.751.900	1.722.600	1.826.000
10	1.544.900	1.637.600						
11			1.635.600	1.733.700	1.704.800	1.807.100	1.776.900	1.883.500
12	1.593.500	1.689.200						
13			1.687.100	1.788.300	1.758.500	1.864.000	1.832.800	1.942.800
14	1.643.700	1.742.400						
15			1.740.200	1.844.700	1.813.800	1.922.700	1.890.600	2.004.000
16	1.695.500	1.797.200						
17			1.795.000	1.902.700	1.871.000	1.983.200	1.950.100	2.067.100
18	1.748.900	1.853.800						
19			1.851.600	1.962.700	1.929.900	2.045.700	2.011.500	2.132.200
20	1.804.000	1.912.200						
21			1.909.900	2.024.500	1.990.700	2.110.100	2.074.900	2.199.400
22	1.860.800	1.972.400						
23			1.970.000	2.088.300	2.053.400	2.176.600	2.140.200	2.268.700



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24	1.919.400	2.034.600						
25			2.032.100	2.154.000	2.118.100	2.245.100	2.207.600	2.340.100
26	1.979.900	2.098.600						
27			2.096.100	2.221.900	2.184.800	2.315.800	2.277.200	2.413.800

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Republik Indonesia  
Menteri Kesejahteraan Rakyat,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 73 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 10 JULI 2014**

**DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014**

MKG	Golongan II							
	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.714.100	1.816.900						
1	1.741.100	1.845.600						
2								
3	1.795.900	1.903.700	1.871.900	1.984.200	1.951.100	2.068.100	2.033.600	2.155.600
4								
5	1.852.500	1.963.600	1.930.900	2.046.700	2.012.500	2.133.300	2.097.700	2.223.500
6								
7	1.910.800	2.025.500	1.991.700	2.111.200	2.075.900	2.200.500	2.163.700	2.293.500
8								
9	1.971.000	2.089.300	2.054.400	2.177.700	2.141.300	2.269.800	2.231.900	2.365.800
10								
11	2.033.100	2.155.100	2.119.100	2.246.200	2.208.700	2.341.300	2.302.200	2.440.300
12								
13	2.097.100	2.223.000	2.185.800	2.317.000	2.278.300	2.415.000	2.374.700	2.517.200
14								
15	2.163.200	2.293.000	2.254.700	2.390.000	2.350.100	2.491.100	2.449.500	2.596.400
16								
17	2.231.300	2.365.200	2.325.700	2.465.200	2.424.100	2.569.500	2.526.600	2.678.200
18								
19	2.301.600	2.439.700	2.398.900	2.542.900	2.500.400	2.650.400	2.606.200	2.762.600
20								
21	2.374.100	2.516.500	2.474.500	2.623.000	2.579.200	2.733.900	2.688.300	2.849.600
22								
23	2.448.800	2.595.800	2.552.400	2.705.600	2.660.400	2.820.000	2.772.900	2.939.300



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MKG	Golongan II							
	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24								
25	2.526.000	2.677.500	2.632.800	2.790.800	2.744.200	2.908.800	2.860.300	3.031.900
26								
27	2.605.500	2.761.900	2.715.700	2.878.700	2.830.600	3.000.400	2.950.300	3.127.400
28								
29	2.687.600	2.848.800	2.801.300	2.969.300	2.919.800	3.094.900	3.043.300	3.225.900
30								
31	2.772.200	2.938.600	2.889.500	3.062.900	3.011.700	3.192.400	3.139.100	3.327.500
32								
33	2.859.500	3.031.100	2.980.500	3.159.300	3.106.600	3.293.000	3.238.000	3.432.300

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Menteri Pariwisata dan  
Budaya  
Menteri Kesejahteraan Rakyat,



Surat Indrijarso



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 73 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 JULI 2014

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

MKG	Golongan III							
	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	2.186.400	2.317.600	2.278.900	2.415.600	2.375.300	2.517.800	2.475.700	2.624.300
1								
2	2.255.200	2.390.600	2.350.600	2.491.700	2.450.100	2.597.100	2.553.700	2.706.900
3								
4	2.326.300	2.465.900	2.424.700	2.570.200	2.527.200	2.678.900	2.634.100	2.792.200
5								
6	2.399.500	2.543.500	2.501.000	2.651.100	2.606.800	2.763.300	2.717.100	2.880.100
7								
8	2.475.100	2.623.600	2.579.800	2.734.600	2.688.900	2.850.300	2.802.700	2.970.800
9								
10	2.553.100	2.706.300	2.661.100	2.820.700	2.773.600	2.940.000	2.891.000	3.064.400
11								
12	2.633.500	2.791.500	2.744.900	2.909.600	2.861.000	3.032.600	2.982.000	3.160.900
13								
14	2.716.400	2.879.400	2.831.300	3.001.200	2.951.100	3.128.200	3.075.900	3.260.500
15								
16	2.802.000	2.970.100	2.920.500	3.095.700	3.044.000	3.226.700	3.172.800	3.363.200
17								
18	2.890.200	3.063.600	3.012.500	3.193.200	3.139.900	3.328.300	3.272.700	3.469.100
19								
20	2.981.300	3.160.100	3.107.400	3.293.800	3.238.800	3.433.100	3.375.800	3.578.400
21								
22	3.075.100	3.259.700	3.205.200	3.397.500	3.340.800	3.541.300	3.482.100	3.691.100
23								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24	3.172.000	3.362.300	3.306.200	3.504.500	3.446.000	3.652.800	3.591.800	3.807.300
25								
26	3.271.900	3.468.200	3.410.300	3.614.900	3.554.600	3.767.800	3.704.900	3.927.200
27								
28	3.374.900	3.577.400	3.517.700	3.728.800	3.666.500	3.886.500	3.821.600	4.050.900
29								
30	3.481.200	3.690.100	3.628.500	3.846.200	3.782.000	4.008.900	3.942.000	4.178.500
31								
32	3.590.900	3.806.300	3.742.800	3.967.300	3.901.100	4.135.200	4.066.100	4.310.100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Dokumentasi Kesejahteraan Rakyat,



Surat Indrijarso



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 73 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 JULI 2014

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru								
0	2.580.500	2.735.300	2.689.600	2.851.000	2.803.400	2.971.600	2.922.000	3.097.300	3.045.600	3.228.300
1										
2	2.661.700	2.821.400	2.774.300	2.940.800	2.891.700	3.065.200	3.014.000	3.194.800	3.141.500	3.330.000
3										
4	2.745.600	2.910.300	2.861.700	3.033.400	2.982.800	3.161.700	3.108.900	3.295.500	3.240.400	3.434.900
5										
6	2.832.000	3.002.000	2.951.800	3.128.900	3.076.700	3.261.300	3.206.800	3.399.300	3.342.500	3.543.000
7										
8	2.921.200	3.096.500	3.044.800	3.227.500	3.173.600	3.364.000	3.307.800	3.506.300	3.447.800	3.654.600
9										
10	3.013.200	3.194.000	3.140.700	3.329.100	3.273.600	3.470.000	3.412.000	3.616.700	3.556.400	3.769.700
11										
12	3.108.100	3.294.600	3.239.600	3.434.000	3.376.700	3.579.300	3.519.500	3.730.700	3.668.400	3.888.500
13										
14	3.206.000	3.398.400	3.341.700	3.542.200	3.483.000	3.692.000	3.630.300	3.848.200	3.783.900	4.010.900
15										
16	3.307.000	3.505.400	3.446.900	3.653.700	3.592.700	3.808.300	3.744.700	3.969.400	3.903.100	4.137.300
17										
18	3.411.200	3.615.800	3.555.500	3.768.800	3.705.900	3.928.200	3.862.600	4.094.400	4.026.000	4.267.600
19										
20	3.518.600	3.729.700	3.667.400	3.887.500	3.822.600	4.051.900	3.984.300	4.223.300	4.152.800	4.402.000
21										
22	3.629.400	3.847.200	3.782.900	4.009.900	3.943.000	4.179.500	4.109.700	4.356.300	4.283.600	4.540.600
23										



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru								
24	3.743.700	3.968.300	3.902.100	4.136.200	4.067.100	4.311.200	4.239.200	4.493.500	4.418.500	4.683.600
25										
26	3.861.600	4.093.300	4.025.000	4.266.500	4.195.200	4.447.000	4.372.700	4.635.100	4.557.700	4.831.100
27										
28	3.983.300	4.222.300	4.151.700	4.400.900	4.327.400	4.587.000	4.510.400	4.781.000	4.701.200	4.983.300
29										
30	4.108.700	4.355.200	4.282.500	4.539.500	4.463.700	4.731.500	4.652.500	4.931.600	4.849.300	5.140.200
31										
32	4.238.100	4.492.400	4.417.400	4.682.400	4.604.200	4.880.500	4.799.000	5.086.900	5.002.000	5.302.100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Surat Indrijarso

(100% 8)